

ANALISIS PROFIL DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA MISKIN DI INDONESIA: STUDI KASUS DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh: Ismail Nurdin dan Sutiyo¹

Fakultas Politik Pemerintahan IPDN Jatinangor

¹ E-mail: sutiyo@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the socio economic condition and the expenditure of poor households to formulate the most appropriate policies of poverty alleviation in Indonesia. Data were collected through questionnaire, interview and observation to 648 poor households in 18 villages in Purbalingga district. This study finds that most poor households have the household heads in productive age but having limited choices to earn income due to low education level, having only small plot of cropland, and limited skills out of farming sector. The larger parts of their expenditure are used for food needs, mainly rice, tobacco and vegetables. The non-food expenditure mainly consists of educational cost, party cost and house reparation. The recommended policies of poverty alleviation consist of efforts to reduce the expenditure of poor households through stabilization of food price and the improvement in implementation of Raskin program, Program Indonesia Pintar, and Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. To increase the income of poor households, the government needs to revitalize agriculture sectors by changing the farming commodity from food crops to cash crops.

Keywords: *expenditure analysis; poor households; poverty alleviation*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis profil dan pengeluaran rumah tangga miskin untuk merumuskan jenis kebijakan yang paling tepat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara dan observasi terhadap 648 rumah tangga miskin pada 18 desa di kabupaten Purbalingga. Studi ini menemukan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin memiliki kepala keluarga yang masih usia produktif namun tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan karena tingkat pendidikan yang rendah, kepemilikan lahan yang sempit dan terbatasnya keterampilan di luar bidang pertanian. Pengeluaran mereka sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama beras, rokok/tembakau dan sayur-sayuran. Jenis pengeluaran non pangan yang cukup besar adalah biaya pendidikan, menghadiri resepsi dan perbaikan rumah. Jenis kebijakan yang direkomendasikan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan terdiri dari upaya untuk mengurangi beban pengeluaran melalui stabilisasi harga kebutuhan pangan dan perbaikan terhadap implementasi program Beras Miskin, Program Indonesia Pintar dan

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, perlu dilakukan revitalisasi sektor pertanian dengan merubah jenis komoditas dari pertanian tanaman pangan menjadi tanaman hortikultura.

Kata kunci: analisis pengeluaran; rumah tangga miskin; penanggulangan kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk hidup layak (J. Haughton & Khandker, 2009). Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang bukan hanya terkait dimensi *monetary* seperti pendapatan, namun juga dimensi *non monetary* seperti perumahan, kesehatan, pendidikan dan akses terhadap infrastruktur dasar. di Indonesia, persentase penduduk miskin pada tahun 2016 adalah sebesar 10,86% (BPS, 2016b). Review yang dilakukan oleh Sutiyo dan Maharjan (2011) menemukan bahwa semenjak tahun 1998, penanggulangan kemiskinan terjadi dengan lambat dan fluktuatif, yang berarti bahwa angka kemiskinan bisa dengan mudah naik kembali jika terjadi guncangan ekonomi seperti inflasi dan pencabutan subsidi.

Pemerintah Indonesia sebetulnya tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan kemiskinan. Berbagai macam program telah dilaksanakan, antara lain program-program perlindungan sosial seperti Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Rehab Rumah tidak Layak Huni, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Program lainnya adalah peningkatan infrastruktur daerah

tertinggal melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan penguatan permodalan melalui Simpan Pinjam Perempuan PNPM (SPP PNPM). Meskipun anggaran pemerintah untuk program perlindungan sosial relatif lebih kecil dari negara-negara maju, jumlahnya cenderung meningkat setiap tahun. Jika pada tahun 1994 anggaran penanggulangan kemiskinan hanya berjumlah sekitar 1% dari APBN, jumlahnya telah mencapai angka 8% APBN selama beberapa tahun terakhir (Sutiyo dan Maharjan, 2011).

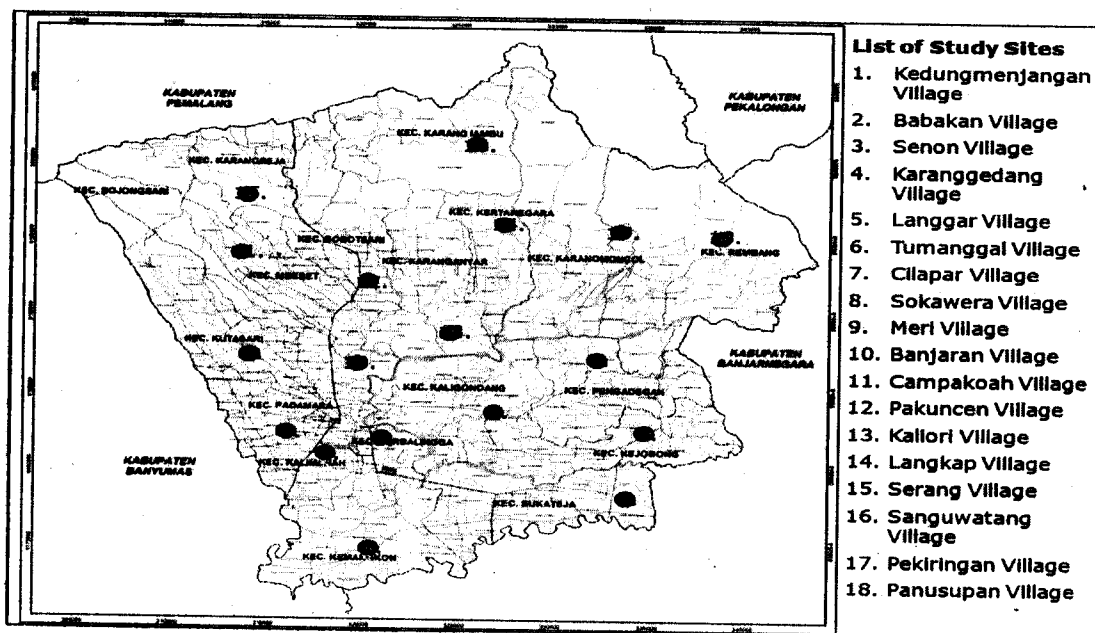
Beberapa studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan merumuskan rekomendasi yang diperlukan pemerintah. Sutiyo dan Maharjan (2011) menemukan dua permasalahan implementasi yang paling pokok, yaitu lemahnya kapasitas pelaksana program dan rendahnya ketepatan distribusi program. Temuan yang hampir sama juga diidentifikasi dari studi lainnya, seperti terjadi pada pelaksanaan program Raskin (Hastuti et al., 2008; Sutiyo dan Maharjan, 2013), PNPM (Sutiyo dan Maharjan, 2013; Syukri et al., 2013; Voss, 2008) dan PSKS (Satriana, 2009). Dari keseluruhan studi tersebut, nampak bahwa permasalahan yang paling pokok adalah ketidaktepatan sasaran, lemahnya kapasitas pelaksana dan keterbatasan anggaran pemerintah untuk melaksanakan program.

Pada saat studi lainnya memfokuskan kajian pada upaya perbaikan pelaksanaan program, studi ini menggunakan cara baru dalam berkontribusi terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan mengidentifikasi jenis kebijakan yang paling tepat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan melakukan analisis pada profil dan pengeluaran rumah tangga miskin. Studi ini berangkat dari sebuah gagasan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang baik adalah yang mengarah pada dua hal, yaitu menurunnya beban pengeluaran dan meningkatnya pendapatan rumah tangga miskin. Berangkat dari gagasan inilah, maka studi ini memiliki tiga tujuan, yaitu: 1) menganalisis profil rumah tangga miskin; 2) menganalisis pengeluaran rumah tangga miskin, dan; 3) merumuskan kebijakan yang paling

tepat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia berdasarkan hasil analisis profil dan pengeluaran tersebut.

METODE

Studi ini dilakukan melalui *fieldwork* di kabupaten Purbalingga provinsi Jawa Tengah, yang telah dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah bahwa kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten termiskin di provinsi Jawa Tengah (TNP2K, 2014), sebuah provinsi yang juga memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia (BPS, 2016a). dengan mengambil lokasi penelitian di kabupaten Purbalingga, maka fenomena kemiskinan akan relatif mudah dijumpai, sehingga data penelitian yang dikumpulkan menjadi lebih kaya.



Gambar 1.
Peta Sebaran Lokasi Penelitian di Kabupaten Purbalingga (tanpa skala)

Di Kabupaten Purbalingga, kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) telah mengidentifikasi bahwa pada tahun 2014 terdapat sejumlah 100.281 rumah tangga miskin yang harus menjadi prioritas program penanggulangan kemiskinan. Mereka adalah populasi penelitian ini, yang merupakan rumah tangga yang telah di data oleh BPS berdasarkan kriteria kondisi rumah, kepemilikan asset dan akses terhadap listrik, air bersih dan sanitasi. Jumlah ini berarti sekitar 44% dari seluruh rumah tangga di kabupaten Purbalingga yang berjumlah 223.658 rumah tangga (BPS Purbalingga, 2015). Jumlah sampel ditentukan sebesar 648 rumah tangga, yang dipilih dengan teknik *purposive random sampling* dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Purbalingga. Jumlah ini sudah melebihi batas minimal sampel untuk populasi 100.281 rumah tangga menurut Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 0,5%, yaitu sebesar 398 rumah tangga. Setiap kecamatan diambil satu desa yang mewakili karakter geografis dan kondisi kewilayahan (Figure 1). dengan demikian, pada setiap desa diambil 36 rumah tangga sebagai sampel penelitian.

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juni tahun 2015 melalui kuesioner, observasi dan wawancara yang dilakukan oleh 18 (delapan belas) orang enumerator dan tenaga pendamping. Data yang diperoleh akan diolah dengan teknik statistika deskriptif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Dari total 648 responden, sebagian besar memiliki kepala keluarga laki-laki

(89%), berusia antara 41-50 tahun (31%), berpendidikan SD sederajat (52%), dan bekerja di sektor pertanian padi dan palawija (30%), dengan kepemilikan lahan pertanian di bawah 0,5 hektare (97%) (Tabel 1). Profil ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala rumah tangga masih dalam usia produktif. Hanya 29% yang termasuk kategori usia tidak produktif atau di atas 60 tahun.

Tabel 1
Profil Responden, 2015

No	Kondisi Sosial Ekonomi	Jumlah (Rumah Tangga)	Persentase
1	Jenis kelamin kepala rumah tangga		
	- Laki-laki	577	89%
	- Perempuan	71	11%
2	Kelompok Umur		
	- ≤ 30 tahun	14	2%
	- 31-40 tahun	97	15%
	- 41-50 tahun	200	31%
	- 51-60 tahun	150	23%
	- 61-70 tahun	105	16%
3	Pendidikan kepala rumah tangga		
	- Tidak punya ijazah	274	42%
	- SD sederajat	335	52%
	- SMP sederajat	35	5%
	- SMA sederajat	4	1%

4	Pekerjaan kepala rumah tangga		
	- Pertanian (padi dan palawija)	194	30%
	- Bangunan/konstruksi	97	15%
	- Industri pengolahan	81	13%
	- Perdagangan	52	8%
	- Perkebunan	37	6%
	- Transportasi	25	4%
	- Jasa	24	4%
	- Hortikultura	19	3%
	- Lainnya	95	15%
5	Kepemilikan tanah pertanian		
	- < 0,5 hektare	629	97%
	- ≥ 0,5 hektare	19	3%

Sumber: Survei, 2015

Dengan demikian, sebagian besar kepala rumah tangga masih mampu untuk bekerja mencari penghasilan, dan tidak sepenuhnya tergantung kepada bantuan dari pihak lain maupun pemerintah. dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh rumah tangga miskin untuk memperoleh penghasilan, kecuali bekerja pada sektor pertanian maupun sektor informal. Namun, sebagai rumah tangga petani, ternyata kepemilikan lahan mereka sedikit, yaitu hanya di bawah 0,5 hektare. Berdasarkan kategorisasi umum di bidang pertanian, rumah tangga ini termasuk dalam kategori petani gurem, atau petani dengan kepemilikan lahan sempit, yang biasanya akan sangat sulit mencukupi kebutuhan hidup hanya dari

sektor pertanian. Profil ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan pendapatan responden akan cukup sulit dilakukan, karena kapasitas SDM yang rendah.

Tabel 2.
Kondisi Anggota Rumah Tangga Responden, 2015

No	Kondisi Rumah Tangga	Jumlah (Rumah Tangga)	Persentase
1	Jumlah anggota keluarga		
	- Minimum	1 orang	
	- Maksimum	10 orang	
	- Rata-rata per keluarga	3.86 orang	
2	Jumlah rumah tangga dengan anggota keluarga yang cacat	31	5%
3	Jumlah rumah tangga dengan anggota keluarga punya sakit kronis	102	16%
4	Jumlah rumah tangga dengan anak balita	200	31%
5	Jumlah rumah tangga dengan anak sekolah (SD-SMA)	363	56%

Sumber: Survei, 2015

Dalam hal komposisi rumah tangga, rata-rata jumlah anggota keluarga dari responden adalah 3,86 orang per keluarga, meskipun ditemukan juga sebagian kecil responden yang memiliki lebih banyak anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga per rumah tangga ini sebetulnya cukup moderat di Indonesia. Hal selanjutnya yang perlu mendapat perhatian karena sangat terkait dengan produktivitas kerja adalah status kesehatan dan usia anggota keluarga. Studi ini menemukan sekitar

5% rumah tangga yang memiliki anggota keluarga cacat, dan 16% rumah tangga yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis. Hal ini berarti bahwa pada rumah tangga miskin terdapat permasalahan rendahnya produktivitas kerja karena faktor kesehatan dan kondisi biologis lainnya. Faktor lainnya yang mempertinggi angka ketergantungan dan beban pengeluaran rumah tangga adalah jumlah anak yang menjadi tanggungan. Studi ini menemukan bahwa 31% responden memiliki anggota keluarga berumur lima tahun ke bawah, dan 56% rumah tangga memiliki anggota keluarga yang sedang menempuh pendidikan formal SD, SMP maupun SMA sederajat (Tabel 2 di atas).

Pola Pengeluaran Responden

Setiap rumah tangga harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membiayai kebutuhan dasar yang diperlukan. Kebutuhan ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan pangan minimal setara dengan asupan kalori 2.100 kilo kalori per orang per hari, dan kebutuhan non pangan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan transportasi (BPS & Kemensos RI, 2012). Jumlah pengeluaran minimal untuk dapat hidup layak dihitung secara matematis menjadi garis kemiskinan, yang mana di kabupaten Purbalingga telah ditetapkan sebesar Rp. 270.000,00 per orang per bulan (BPS Purbalingga, 2015).

Dari hasil pengolahan kuesioner, ditemukan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga responden per bulan adalah Rp. 1.363.271,00, yang terdiri dari pengeluaran untuk kebutuhan pangan

sebesar Rp. 873.017,00 dan pengeluaran untuk kebutuhan non pangan sebesar Rp. 490.254,00. Jika dirata-rata per orang, maka total pengeluaran per orang selama satu bulan adalah Rp. 400.315,00, yang terdiri dari Rp. 263.068,00 untuk kebutuhan pangan dan Rp. 263.068,00 untuk kebutuhan non pangan (Tabel 3).

Tabel 3.
Rata-Rata Pengeluaran Responden, 2015

No	Jenis Pengeluaran	Rata-rata Per Bulan (Rp)
1	Per rumah tangga	
	- Total pengeluaran	1.363.271,00
	- Pengeluaran pangan	873.017,00
	- Pengeluaran non pangan	490.254,00
2	Per orang	
	- Total pengeluaran	400.315,00
	- Pengeluaran pangan	263.068,00
	- Pengeluaran non pangan	137.248,00

Sumber: Survei, 2015

Dengan melihat jumlah pengeluaran tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata pengeluaran responden sudah berada di atas garis kemiskinan Purbalingga, yaitu sekitar Rp. 270.000,00 per orang per bulan. Rata-rata pengeluaran responden adalah 150% dari garis kemiskinan. Angka ini menunjukkan bahwa jika hanya dilihat dari aspek pengeluaran, maka sesungguhnya banyak diantara responden yang selama ini dianggap sebagai kelompok tidak mampu adalah tidak masuk kategori miskin. Meskipun demikian, hasil observasi terhadap kondisi rumah dan kepemilikan asset antara responden tidak menemukan perbedaan yang terlalu mencolok antara satu dengan yang lain.

Tabel 4.
Komponen Pengeluaran Pangan Rumah
Tangga, 2015

No	Jenis Pengeluaran Pangan Rumah Tangga	Rata-rata Per Bulan (Rp)
1	Beras	246.172,00
2	Tembakau dan rokok	119.249,00
3	Sayur-sayuran	94.042,00
4	Kacang-kacangan	67.445,00
5	Minyak goreng	62.085,00
6	Bahan minuman (gula, teh, kopi, dll)	52.270,00
7	Bumbu-bumbuan	51.984,00
8	Mie	32.544,00
9	Telur	30.711,00
10	Ayam dan daging	23.371,00
11	Tepung-tepungan	22.525,00
12	Ikan asin	16.930,00
13	Susu	15.971,00
14	Buah-buahan	14.461,00
15	Umbi-umbian	11.704,00
16	Ikan segar	9.441,00
17	Jagung	2.113,00

Sumber: Survei, 2015

Beras, tembakau atau rokok, dan sayur-sayuran merupakan tiga besar jenis bahan yang dibeli rumah tangga responden setiap bulan (Tabel 4). Satu hal yang cukup mengejutkan adalah bahwa pengeluaran untuk rokok ternyata menempati urutan kedua setelah beras. Responden rata-rata membelanjakan Rp. 119.249,00 per bulan untuk membeli rokok, yang jauh lebih banyak untuk membeli lauk pauk lainnya. Jumlah ini adalah jumlah yang cukup besar, bahkan hampir mencapai 50% dari pengeluaran untuk membeli beras. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin lebih rela untuk

membelanjakan uang untuk membeli rokok daripada untuk meningkatkan konsumsi gizi di keluarga mereka.

Tabel 5.
Jenis Pengeluaran Non Pangan Rumah
Tangga, 2015

No	Jenis Konsumsi per Rumah Tangga	Rata-rata per Bulan (Rp)
1	Biaya uang saku sekolah anak	105.007,00
2	Menghadiri resepsi	71.336,00
3	Perbaikan rumah	71.289,00
4	Bensin dan transportasi	62.166,00
5	SPP, buku dan biaya pendidikan di luar uang saku harian	37.595,00
6	Tagihan listrik	35.384,00
7	Pakaian	29.895,00
8	Biaya kesehatan	25.366,00
9	Gas dan minyak tanah	24.239,00
10	Pulsa dan telpon	21.198,00
11	Pajak	6.779,00

Sumber: Survei, 2015

Biaya uang saku sekolah anak merupakan jenis pengeluaran non pangan yang paling besar, diikuti dengan biaya menghadiri resepsi dan pesta (*kondangan*) dan biaya perbaikan rumah (Tabel 5). Rata-rata responden mengeluarkan Rp. 105.007,00 setiap bulan untuk uang saku sekolah anak. Jika di tambah dengan jenis pengeluaran pendidikan lainnya, yaitu sumbangan sekolah dan buku (peringkat 5), maka total pengeluaran pendidikan responden akan semakin besar. Tingginya pengeluaran pendidikan, yaitu uang saku sekolah anak, pada responden menunjukkan bahwa rumah tangga miskin pun telah memiliki pengeluaran yang substansial untuk investasi pendidikan. Hal yang cukup mengherankan adalah

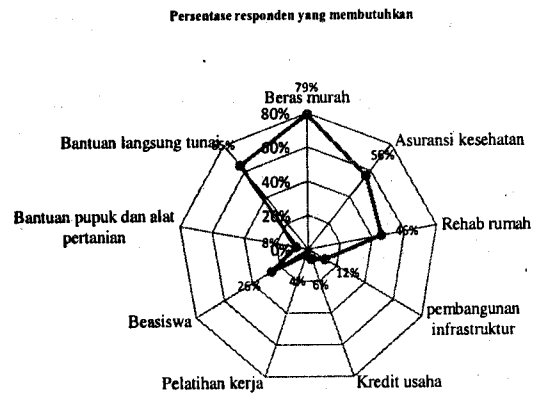
tingginya pengeluaran untuk menghadiri resepsi dan pesta seperti resepsi pernikahan, khitanan dan sejenisnya, dengan rata-rata per bulan sebesar Rp. 71.336,00. pada masyarakat pedesaan di mana acara pernikahan maupun khitanan biasanya dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu saja, maka akumulasi pengeluaran untuk menghadiri resepsi akan menjadi beban yang cukup berat bagi rumah tangga miskin.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang Diperlukan

Dalam kuesioner, studi ini telah meminta kepada responden untuk mengidentifikasi tiga jenis program penanggulangan kemiskinan yang paling mereka butuhkan. Dari perspektif responden, jenis program penanggulangan kemiskinan yang paling mereka butuhkan adalah beras murah serupa program Raskin namun dengan alokasi pembagian beras yang sesuai dengan ketentuan. Jumlah responden yang memilih program ini adalah 79%, disusul kemudian dengan bantuan langsung tunai (65%), jaminan kesehatan (56%), rehab rumah (46%), beasiswa (26%), pembangunan infrastruktur (12%), bantuan pupuk dan alat pertanian (8%), kredit usaha (6%), dan pelatihan kerja (4%) (Gambar 2).

Pilihan yang dibuat responden tersebut bisa jadi sangat dipengaruhi oleh pemahaman responden terhadap jenis kebijakan apa saja yang bisa dilakukan. Terlihat bahwa sebagian besar responden cenderung memilih jenis kebijakan yang mengarah pada pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Bagaimanapun, sesuai dengan gagasan awal studi ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan yang paling baik adalah yang

jaminan kesehatan, rehab rumah dan bantuan langsung tunai. Cukup sedikit responden yang memilih jenis program yang mengarah pada upaya peningkatan pendapatan seperti kredit usaha, pelatihan kerja dan bantuan pupuk.



Gambar 2.
Jenis Program Penanggulangan Kemiskinan yang Dibutuhkan Responden

Jika jenis program penanggulangan kemiskinan dirumuskan hanya berdasarkan persepsi responden sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak akan berkelanjutan karena hanya menitikberatkan pada distribusi bantuan sosial. dengan demikian, hasil pengolahan data sebagaimana dipaparkan pada Figure 2 tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya argumentasi perumusan jenis kebijakan yang tepat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Persepsi responden tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Bagaimanapun, sesuai dengan gagasan awal studi ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan yang paling baik adalah yang

mengarah pada pengurangan pengeluaran dan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

- ***Mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin***

Pengeluaran pangan merupakan pengeluaran terbesar responden, terutama untuk komoditas beras. dengan demikian, stabilisasi harga kebutuhan pangan, terutama beras, harus dilakukan jika pemerintah ingin mempercepat penanggulangan kemiskinan. pada beberapa kasus rumah tangga sangat miskin, sangat mungkin mereka masih tidak mampu membeli beras meskipun harganya sudah ditekan dan stabil di pasaran. dengan demikian, kebijakan pemberian beras harga subsidi khusus bagi rumah tangga miskin sebagaimana telah dilakukan melalui program Raskin dapat terus dilanjutkan. Beberapa hasil temuan seperti ketidaktepatan sasaran dan kualitas beras yang tidak layak konsumsi (Hastuti et al., 2008; Sutiyo dan Maharjan, 2013) perlu mendapat tindak lanjut dengan berbagai perbaikan pada peningkatan ketepatan distribusi dan kualitas beras yang dibagikan. Jenis kebijakan ini selaras dengan pilihan terbanyak responden terhadap jenis program penanggulangan kemiskinan yang dibutuhkan.

Kebijakan lain yang tidak kalah pentingnya adalah upaya mengurangi konsumsi tembakau pada masyarakat miskin. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, konsumsi tembakau dan rokok menduduki peringkat kedua terbesar dalam pengeluaran responden. Upaya sosialisasi bahaya tembakau dan pengetatan larangan merokok harus terus dilakukan oleh pemerintah.

Terkait dengan pengeluaran non pangan, studi ini telah menemukan bahwa pengeluaran terbesar adalah biaya pendidikan. Tingginya pengeluaran pendidikan oleh rumah tangga miskin perlu mendapat perhatian, karena meskipun pemerintah telah melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ternyata rumah tangga miskin masih harus mengalokasikan pengeluaran non pangan terbesar untuk biaya personal pendidikan. dengan demikian, maka jenis program bantuan biaya pendidikan yang diberikan secara selektif hanya kepada siswa miskin adalah mutlak diperlukan. Beberapa program yang sudah berjalan saat ini seperti Program Indonesia Pintar (PIP) perlu dilanjutkan dengan kajian yang mendalam dan perbaikan terhadap ketepatan sasaran dan peningkatan jumlah bantuan dana yang mencukupi kebutuhan.

Pengeluaran non pangan berikutnya yang cukup besar adalah menghadiri resepsi. Hal ini terlihat sebagai bagian dari adat masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama di wilayah pedesaan, yang menganggap bahwa memberikan sejumlah uang atau barang pada saat menghadiri resepsi adalah wajib. pada sebagian besar kasus, hasil wawancara menunjukkan bahwa jenis hadiah yang diberikan telah ditandai pemberi dan dianggap sebagai hutang sosial yang harus diganti pada waktunya nanti. dengan demikian, adat menghadiri resepsi yang pada awalnya merupakan bentuk solidaritas sosial sebagai membantu sesama telah menjadi beban pengeluaran bagi rumah tangga miskin. Karena hal ini terkait adat, maka sepertinya belum ada kebijakan yang dalam waktu cepat bisa diharapkan merubah pola pengeluaran

ini. Upaya yang bisa dilakukan adalah secara perlahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan makna yang sesungguhnya dari memberikan hadiah pada saat resepsi.

Pengeluaran non pangan selanjutnya yang juga cukup besar adalah untuk perumahan. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki rumah tidak layak huni dengan konstruksi yang mudah rusak, sehingga pengeluaran tersebut digunakan untuk biaya perbaikan rumah. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian besar responden, biaya perbaikan rumah cenderung dikeluarkan setiap tahun karena renovasi yang dilakukan tidak pernah menyeluruh dan bersifat tambal sulam. dengan demikian, beberapa program yang saat ini sudah dilakukan antara lain program rehab rumah yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah untuk rehab rumah. Jumlah dana ini sebetulnya masih kurang dari cukup untuk melakukan perbaikan rumah secara menyeluruh. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan dana tersebut sebagai stimulan. Artinya, melalui program tersebut pemerintah memobilisasi bantuan dan swadaya dari masyarakat sekitar untuk ikut memperbaiki tempat tinggal warga miskin. Paling tidak, dengan memanfaatkan budaya gotong-royong dan solidaritas sosial masyarakat pedesaan, maka ongkos tenaga kerja untuk pembangunan rumah dapat ditekan. Dana bantuan yang diberikan pemerintah tersebut dapat digunakan seluruhnya untuk membeli material bangunan yang tidak dapat dicukupi dari swadaya masyarakat.

Desain program semacam ini diharapkan dapat memperbaiki rumah warga miskin secara lebih baik, yang pada akhirnya mengurangi pengeluaran tahunan untuk perbaikan rumah yang biasanya mereka lakukan.

- ***Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin***

Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, di antaranya adalah faktor usia, pendidikan dan keterampilan dan kepemilikan faktor produksi. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian 3.1 sebelumnya, sebagian besar kepala rumah tangga masih dalam usia produktif, berpendidikan SD sederajat, bekerja di sektor pertanian namun dengan kepemilikan lahan yang sempit. dengan mempertimbangkan faktor tersebut, maka upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin tidak bisa dilakukan keluar dari sektor pertanian.

Selama ini pembangunan pertanian identik dengan peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi. Padahal, efek pengentasan kemiskinan dari peningkatan produksi tanaman pangan biasanya kecil karena nilai ekonominya rendah. di samping itu, petani biasanya belum mampu menjual langsung ke konsumen, sehingga sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh tengkulak.

Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa efek penanggulangan kemiskinan pada pertanian hortikultura seperti buah, sayur, tanaman hias dan tanaman obat, jauh lebih besar daripada tanaman pangan (Axelsson, 2008; J. Haughton, 1994; Smith, 2004). Pertanian hortikultura lebih

cocok untuk para petani gurem karena komoditas ini mempunyai harga jual yang tinggi, sehingga total nilai ekonominya tetap besar walau di lahan sempit. Beberapa komoditas memiliki masa tanam pendek dan frekuensi panen tinggi, sehingga akumulasi pendapatan per tahun tetap besar. di samping itu, pangsa pasar yang luas memungkinkan petani dapat memasarkan langsung pada konsumen, sehingga mengurangi mata rantai distribusi dan memperbesar keuntungan.

Agar terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dipikirkan untuk membuat skema agar petani gurem menikmati subsidi pertanian yang lebih besar dibandingkan petani lahan luas. Caranya adalah dengan menyalurkan bantuan bibit, pupuk dan obat-obatan kepada petani gurem miskin melalui skema yang hampir sama dengan penyaluran program perlindungan sosial selama ini. dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan yang lainnya juga akan lebih terintegrasi dengan pembangunan pertanian. Selama masa transisi sebelum panen, program perlindungan sosial dapat digunakan sebagai jaring pengaman ekonomi masyarakat miskin. Peningkatan infrastruktur melalui PNPM dilakukan untuk meningkatkan akses pemasaran dan prasarana pertanian. Sedangkan SPP PNPM dapat digunakan untuk membantu biaya produksi.

SIMPULAN

Profil rumah tangga miskin sebagian besar terdiri dari rumah tangga yang masih mampu untuk bekerja mencari penghasilan, namun tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan karena tingkat pendidikan

yang rendah dan kepemilikan lahan yang sempit. Pengeluaran masyarakat miskin didominasi oleh pengeluaran pangan, terutama beras, rokok/tembakau dan sayur-sayuran. Terkait dengan pengeluaran non pangan, yang paling mendominasi adalah biaya pendidikan, menghadiri resepsi dan perbaikan rumah.

Dengan memperhatikan profil dan pengeluaran rumah tangga miskin, maka jenis program yang direkomendasikan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan terdiri dari upaya untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui stabilisasi harga kebutuhan pangan, perbaikan terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan selama ini terutama program Beras Miskin, Program Indonesia Pintar dan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui revitalisasi sektor pertanian, terutama dengan merubah komoditas tanaman dari tanaman pangan menjadi tanaman hortikultura.

DAFTAR PUSTAKA

- Axelsson, T. (2008). *Peasants and Policymakers: Agricultural Transformation in Java under Suharto*. Sweden: Holmbergs.
- BPS. (2016a). *Statistik Indonesia 2016*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2016b). *Trend of Selected Socio-Economic Indicators of Indonesia 2016*. Jakarta: BPS.
- BPS, & Kemensos RI. (2012). *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011*. Jakarta: Kemensos RI.

- BPS Purbalingga. (2015). *Purbalingga District in Figure, 2014*. Purbalingga: BPS Purbalingga.
- Hastuti, Mawardi, S., Sulaksono, B., Akhmadi, Devina, S., & Artha, R. P. (2008). *The Effectiveness of the Raskin Program*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Haughton, J. (1994). Tackling Rural Poverty - an Assessment of Alternative Strategies for Mixed-Farming Areas in Peninsular Malaysia. *Developing Economies*, 32(3), 256-278.
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington D. C.: World Bank.
- Satriana, S. (2009). *Impact Assessment of the 2008 Unconditional Cash Transfer Programme (BLT) in Indonesia: Unpublished Master Thesis Netherlands*. Netherlands: Maastricht Graduate School of Governance.
- Smith, L. E. D. (2004). Assessment of the contribution of irrigation to poverty reduction and sustainable livelihoods. *International Journal of Water Resources Development*, 20(2), 243-257. doi: Doi 10.1080/0790062042000206084
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2011). Rural Poverty Alleviation in Indonesia: Programs and the Implementation Gap. *Journal of International Development and Cooperation*, 18(1), 13-22.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2013). Rural Poverty Alleviation Programs Implemented under Decentralization in Indonesia: Case Study of Three Villages in Purbalingga District, Central Java Province. *Journal of Rural Problems*, 191, 121-125.
- Syukri, M., Mawardi, S., Akhmadi, Arif, S., Kartawijaya, & Kurniawan, A. (2013). *A Qualitative Study on the Impact of the PNPM-Rural in East Java, West Sumatra, and Southeast Sulawesi*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- TNP2K. (2014). *Analisis Kondisi Kemiskinan Jawa Tengah*. In TNP2K (Ed.). Jakarta: TNP2K.
- Voss, J. (2008). *Impact Evaluation of the Second Phase of the Kecamatan Development Program in Indonesia*. Jakarta: World Bank Indonesia.